

KONTROVERSI TENTANG NASKAH WANGSAKERTA

*Nina H. Lubis**

Pengantar

Pada awal tahun 2002, di surat kabar terbesar di Jawa Barat, muncul perdebatan tentang Naskah Wangsakerta. Perdebatan ini muncul ketika naskah ini dijadikan rujukan untuk menentukan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat oleh seorang pakar filologi, Edi S. Ekadjati (selanjutnya disingkat ESE). Penulis, sebagai seorang sejarawan, mempertanyakan keabsahan penggunaan naskah ini sebagai sumber sejarah mengingat kontroversi tentang naskah ini. Pada akhir tahun 1980-an, terjadi polemik di surat kabar, majalah, antara para sejarawan, arkeolog, dan filolog tentang naskah ini. Seminar dan diskusi juga telah mengangkat masalah naskah ini ke percaturan nasional.

Asal-usul Naskah Wangsakerta

Pada tahun 1977, Kepala Museum Sri Baduga, Bandung, membeli naskah melalui informan dan perantara yang bernama Moh. Asikin, seorang penduduk Kota Cirebon. Menurut keterangan perantara tersebut, naskah-naskah yang ditawarkannya berasal dari beberapa daerah di Indonesia, seperti Cirebon, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali, bahkan katanya ada yang dari Malaysia. Menurut informan ini pula, naskah-naskah itu dibawa orang ke luar Cirebon karena takut jatuh ke tangan pemerintah kolonial (Ekadjati, 2002).

Pada awal tahun 1980-an, muncul karangan bersambung mengenai naskah-naskah tersebut yang kemudian dinamai "Naskah Pangeran Wangsakerta". Uraian tentang naskah ini ditulis oleh seorang

sastrawan Sunda, Yoseph Iskandar, yang menilai dengan penuh keyakinan bahwa naskah ini sebagai karya sejarah yang bernilai tinggi, bahkan kemudian dibuat cerita-cerita dalam majalah tersebut dengan mengambil bahan dari naskah (Ekadjati, 1988: 1-2)

Naskah ini kemudian dikerjakan secara filologis oleh Atja dan seorang filolog lulusan Universitas Indonesia. Penggarapan naskah dilakukan pula oleh Saleh Danasasmita, Ayatrohaedi, arkeolog dari UI, dan ESE, atas dukungan dana dari Yayasan Pembangunan Jawa Barat. Hasil kajian kemudian diterbitkan terbatas dalam bentuk pengantar, ringkasan isi, suntingan teks, alih aksara (dari aksara Jawa ke Latin), dan terjemahan teks dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia (Ekadjati, 2002).

Selanjutnya, Ayatrohaedi, arkeolog UI yang menyelesaikan disertasinya tentang dialek di Cirebon, dan Saleh Danasasmita menulis tentang isi Naskah Wangsakerta dalam harian *Sinar Harapan* dan majalah *Mangle*, sebuah majalah berbahasa Sunda.

Menurut beberapa sumber, Atja bermaksud menjadikan garapan tentang naskah ini sebagai bahan disertasi di Universitas Indonesia. Akan tetapi, rencana ini ditolak oleh calon tim promotor karena naskah ini dianggap kontroversial. Tentu saja hal ini sangat mengecewakannya mengingat tenaga dan dana yang sudah dikeluarkan untuk menggarapnya cukup besar.

Data tentang Naskah

Naskah Wangsakerta ini ditulis oleh tim di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta. Penulisan dilakukan selama 21 tahun dari tahun 1677 hingga 1698, sesuai dengan

Kontroversi tentang Naskah Wangsakerta

keterangan yang dituliskan dalam teks naskah. Naskah ini ditulis di atas kertas daluang dengan tinta hitam. Menurut penelitian Arsip Nasional Republik Indonesia, yang menguji bahan yang dipergunakan naskah, umur bahan diduga sekitar 100 tahun. Jadi, naskah yang ada di Museum Sri Baduga dapat dianggap sebagai naskah salinan yang ditulis sekitar akhir abad ke-19. Aksara dan bahasa Jawa yang dipergunakan tergolong aksara dan bahasa Jawa pesisiran yang di dalamnya banyak mengandung kosakata bahasa Jawa Kuno (Ekadjati, 2002).

Isi naskah mendeskripsikan sejarah Kepulauan Nusantara, Pulau Jawa, dan Tatar Sunda sejak awal abad Masehi hingga abad ke-17, bahkan ada pula cerita masa prasejarah. Uraian tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara dilengkapi dengan daftar raja-raja yang memerintah secara rinci dengan angka tahun pemerintahannya (Ekadjati, 2002).

Isi teks terdiri atas 5 seri karangan yang masing-masing berjudul *Carita Parahyangan*, *Nagarakretabhumi*, *Pustaka Dwipantara-parwa*, *Pustaka Pararatwan*, *I Bhumi Jawadwipa*, dan *Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara*. Tiap karangan terdiri atas satu sampai beberapa parwa dan tiap parwa terdiri atas beberapa sargah, tiap sargah berwujud satu naskah.

Karangan dalam naskah ini berbentuk prosa dan merefleksikan alam pikiran yang bersifat rasional. Naskah juga dilengkapi dengan 1500 daftar pustaka (Ekadjati, 1988, 2002).

Perdebatan tentang Naskah Wangsakerta

Isi naskah yang menginformasikan sejarah Nusantara begitu lengkap dan cara penulisan yang tergolong modern ternyata mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan, baik sejarawan, arkeolog, maupun filolog. Terjadilah perdebatan yang dilakukan dalam seminar maupun diskusi. Pertama, berlangsung *Diskusi Panel* yang diseleng-

garakan oleh Universitas Tarumanegara, 16 September 1988, kemudian dalam *Gotrasawala (seminar) Pengkajian Naskah-naskah Kuno Jawa Barat*, yang diselenggarakan oleh Universitas Pasundan, 23 Januari 1989. Kemudian ada *Seminar tentang Galuh* di Universitas Siliwangi, yang juga membahas naskah ini. Perdebatan dalam kedua arena diskusi ini menimbulkan dua kelompok yang bersikap pro dan kontra. Yang pro menganggap bahwa naskah ini perlu diteliti secara tuntas, sebelum menganggap naskah ini palsu, sedangkan yang kontra menganggap ini naskah palsu. Kelompok pertama antara lain terdiri dari para penggarap naskah, sedangkan kelompok kedua terdiri dari Dr. Hasan Muarif Ambary, Kepala Puslit Arkenas, Drs. Buchori dan Dr. R.P. Soeyono, arkeolog senior UI, Prof. Dr. Haryati Subadio, waktu itu Dirjen Kebudayaan, Prof. Dr. Budi Santoso, waktu itu Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud (lihat majalah *Mangle*, 1265).

Dalam *Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora III* yang diselenggarakan UGM, pernah naskah ini dipertanyakan karena salah seorang pemakalah memakai naskah ini sebagai salah satu sumber. Juga dalam *Konferensi Internasional Sejarah IAHA (International Association of Historian of Asia)* di Jakarta, penulis menjadi pemakalah, Prof. Dr. M.C. Ricklefs, waktu itu guru besar sejarah dari Monash University, Australia, yang ahli naskah Jawa Kuna, mempertanyakan mengapa naskah Wangsakerta, yang menurutnya palsu, dipergunakan sebagai sumber oleh seorang pemakalah dari Indonesia.

Permasalahan yang menarik ialah tiba-tiba saja setelah hampir 13 tahun berlalu dari perdebatan itu, kini mencuat kembali karena naskah itu dipergunakan sebagai sumber sejarah. Bagaimana sebenarnya kedudukan naskah itu di mata seorang sejarawan?

Cara Kerja Sejarawan

Ketika seorang sejarawan dihadapkan pada suatu pertanyaan tentang masa lalu

manusia, maka langkahnya diarahkan untuk mencari sumber sejarah (*historical source*), yang berisi informasi untuk menjawab pertanyaan itu. Sumber sejarah dapat diklasifikasikan berdasarkan masa pembuatannya, isinya, tujuan pembuatannya, wujudnya, dan asal-usulnya. Yang perlu dikemukakan sehubungan dengan naskah adalah dua klasifikasi yang terakhir. Klasifikasi sumber sejarah berdasarkan wujudnya meliputi tiga golongan, yaitu sumber berupa tulisan, sumber berupa benda, dan sumber lisan. Sumber berupa tulisan, dapat berupa prasasti, silsilah, kalender, annal, kronik, karya-karya sejarah (termasuk sejarah tradisional), biografi, otobiografi, memoar, buku harian, surat-surat pribadi, surat kabar, dan sejenisnya. Naskah yaitu karya yang ditulis dengan tangan termasuk dalam sumber sejarah tertulis. Selanjutnya, klasifikasi sumber sejarah berdasarkan asal-usulnya ialah sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Menurut pembagian yang lebih mutakhir, ada yang disebut sumber tersier dan kuartier. Sumber primer terbagi lagi atas dua golongan yaitu sumber primer kuat (*strictly primary source*) dan sumber primer kurang kuat (*unstrictly primary source*). Sumber primer kuat adalah sumber yang memuat informasi yang berasal dari pelaku sejarah (*actor*), saksi peristiwa sejarah (*eyewitness*); sedangkan sumber primer kurang kuat biasa disebut juga sebagai *sumber sezaman*, yaitu sumber yang berasal dari masa suatu peristiwa sejarah berlangsung, tetapi sumber informasi bukan pelaku atau saksi mata. Sumber sekunder adalah sumber yang berisi informasi dari sumber yang tidak langsung atau bukan dari pelaku ataupun saksi mata (Garraghan, 1946:103-113; *vide*: Gottschalk, 1975 :58-79). Kalau dilihat sepintas istilah sumber primer kurang kuat, dengan sumber sekunder seolah sama. Untuk memahami perbedaannya dapat dilihat pada contoh kasus ini, yaitu berita dari Tome Pires, orang Portugis tentang Fatahillah. Tome Pires pernah datang ke Banten dan singgah di Cirebon antara tahun 1512-1513. Sunan

Gunung Jati, yang menjadi pendiri Kesultanan Cirebon, hidup pada kurun waktu itu. Tome Pires menceritakan dalam bukunya yang berjudul *Suma Oriental*, tentang penguasa Cirebon yang tak pernah dijumpainya secara langsung, artinya ia hanya mendengar dari orang lain tentang pendiri Cirebon tersebut. Maka dari itu, buku *Suma Oriental* tergolong sumber sezaman atau sumber primer kurang kuat untuk informasi tentang Sunan Gunung Jati (Cortesao, 1990: 166-173). Pada tahun 1720, Pangeran Arya Cirebon menyusun naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* yang juga memuat informasi tentang Sunan Gunung Jati. Naskah ini disusun sekitar 150 tahun setelah kematian Sunan Gunung Jati, jadi, penulisnya tidak pernah bertemu langsung dengan Sunan Gunung Jati. Maka dari itu, sumber ini disebut sebagai sumber sekunder untuk informasi tentang Sunan Gunung Jati.

Adanya klasifikasi sumber sejarah primer dan sekunder seperti disebut di atas membedakan nilainya sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah primer yang memberikan informasi langsung dari pelaku atau saksi mata jelas lebih tinggi nilainya sebagai sumber bila dibandingkan dengan sumber sekunder yang memberikan informasi bukan dari pelaku atau saksi mata. Meskipun demikian, sumber sekunder dapat dipergunakan sebagai sumber bila sumber primer tidak ada, dengan catatan, untuk memperoleh fakta (bukan data) harus dilakukan prosedur koraborasi, yaitu pendukung suatu data dari suatu sumber dengan data lain yang berasal dari sumber lain, yang tidak ada hubungan kepentingan di antara sumber-sumber itu atau kedudukan sumber itu bebas (merdeka). Dukungan dari berbagai sumber yang merdeka bisa menghasilkan fakta yang mendekati kepastian (*certainty fact*), sedangkan bila dukungan kurang, mungkin fakta yang dihasilkan hanya sebatas dugaan (*alleged fact*). Bila koraborasi tidak bisa dilakukan karena ketiadaan data atau sumber lain, nilai sumber itu, baik sumber primer ataupun sumber sekunder

Kontroversi tentang Naskah Wangsakerta

dianggap sebagai pembuktian sejarah yang sangat lemah (Garraghan, 1946 :297-304).

Persoalan berikutnya yang menentukan apakah sebuah sumber layak dipakai atau tidak adalah sejauh mana otentisitas dan kredibilitas sumber tersebut. Otentisitas sumber dapat ditentukan melalui kritik ekstern, yaitu kritik dengan melihat wujud naskah. Secara kongkret otentisitas sumber dapat dilihat dari:

1. kapan dan di mana sumber itu ditulis.
2. materi (bahan) sumber, termasuk tinta yang dipergunakan, untuk menyelidiki apakah tidak anakronistis.
3. siapa penulis sumber.
4. identifikasi terhadap tulisan tangan, tanda tangan, meterai, jenis huruf, ataupun *watermerk* ("cap air" yang menunjukkan kapan kertas diproduksi). Untuk mengenali tulisan tangan dapat dibandingkan dengan tulisan lain yang sezaman. Bentuk ataupun langgam tulisan dari satu daerah ataupun dari suatu periode bisa dikenali. Seringkali ejaan, terutama bagi nama diri dan tanda tangan (karena terlalu baik, terlalu buruk atau anakronistis, dan tata bahasa yang ahistoris, menunjukkan adanya pemalsuan. Referensi anakronistis kepada peristiwa-peristiwa (terlalu awal, terlalu akhir, atau terlalu jauh) atau penanggalan dokumen pada suatu waktu ketika pengarang tidak mungkin hadir pada tempat yang ditunjuk dapat membuka kedok pemalsuan. Kadangkadang pemalsu yang pandai telah mengikuti sumber-sumber sejarah yang paling baik secara terlalu cermat sehingga produknya menjadi suatu kopi yang terlalu mencolok pada bagian-bagian tertentu.
5. asal-usul penyimpanan sumber. Suatu dokumen biasanya tersimpan di tempat yang sepatutnya. Naskah-naskah yang pada umumnya dibuat di kalangan keraton ataupun kabupaten (ada juga yang di kalangan pesantren), tentu disimpan di tempat (perpustakaan) yang

pantas sebagai pusaka, atau mungkin disimpan sebagai arsip keluarga, atau di pusat dokumentasi pemerintah. Bila tidak jelas di mana atau dari mana sebuah dokumen berasal, akan timbul pertanyaan mengenai keasliannya (lihat Louis Gottschalk, 1975: 82-84).

Bila telah lolos dari pengujian otentisitas, selanjutnya sebuah sumber diuji kredibilitasnya dengan melakukan kritik intern. Sebuah sumber dapat dipercaya bila lolos dalam pengujian sebagai berikut.

1. Apakah sumber tersebut mampu (kompeten) untuk menyatakan kebenaran.
2. Apakah sumber mau menyatakan kebenaran.

Kemampuan untuk menyatakan kebenaran, antara lain, ditentukan oleh faktor-faktor berikut:

1. kedekatan dengan peristiwa
Artinya sumber informasi hadir dalam peristiwa tersebut. Seorang asing yang tidak pernah berjumpa dengan Sunan Gunung Jati tak akan bisa secara akurat menceritakan bagaimana penampilan pendiri Cirebon tersebut,
2. usia dan kesehatan mental/fisik
Seorang tua yang sudah pikun tidak mungkin mampu menceritakan masa kecilnya, atau seorang anak kecil berusia 3 tahun tidak akan mampu menceritakan suatu pembunuhan yang terjadi di depan matanya.
3. keahlian
Seorang petugas kebersihan lulusan sekolah dasar yang hadir dalam ruangan tempat terjadinya perdebatan seru antara dua orang ahli politik tidak akan mampu menceritakan kembali secara akurat apa yang diperdebatkan tersebut.
4. tingkatan perhatian.
Seorang pedagang Belanda yang datang ke Batavia pada awal abad ke-18 hanya bisa menceritakan bagaimana situasi perdagangan di Batavia waktu

itu, tetapi tidak akan bisa menceritakan bagaimana budaya pribumi waktu itu karena tidak menjadi pusat perhatiannya.

Kemauan untuk menyatakan kebenaran berkaitan erat dengan kepentingan sumber. Bila informasi akan merugikan kepentingan sumber, jelas bahwa sumber tidak mau menyatakan kebenaran. Demikian pula sebaliknya, bila tidak merugikan, besar kemungkinan sumber akan mau menyatakan kebenaran.

Prinsip lainnya, yang dapat dijadikan pegangan sejarawan, adalah bahwa setiap karya sejarah, sastra-sejarah, selalu mencerminkan latar belakang sosio kultural masyarakat yang menghasilkannya. Jadi, ada *kulturgebundenheit* (ikatan kebudayaan), *tijdgebundenheit* (ikatan waktu). Setiap karya juga selalu mencerminkan *zeitgeist*-nya (jiwa zamannya) (Kartodirdjo, t.t). Karya historiografi tradisional, termasuk naskah sejarah, biasanya juga dituliskan bukan untuk menulis sejarah, tetapi lebih untuk meneguhkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya (Abdullah, 1985: xxi).

Kritik Sumber terhadap Naskah Wangsakerta

Dengan mengetahui dasar-dasar metode sejarah di atas, bisa ditentukan sejauh mana Naskah Wangsakerta dapat dipakai sebagai sumber sejarah. Berikut ini kritik sumber yang dapat dilakukan sebagai pendahuluan.

Menurut hasil kajian filologi, naskah Wangsakerta tergolong naskah salinan (Ekadjati, 1988, 2002). Bahan atau materi yang dipergunakan berdasarkan hasil pengujian di Arsip Nasional Republik Indonesia, berumur sekitar 100 tahun (dihitung dari tahun 1988, yaitu ketika bahan naskah itu diuji). Jadi, kemungkinan naskah itu disalin akhir abad ke-19. Sementara keterangan dalam naskah menyebutkan bahwa naskah itu disusun akhir abad ke-17. Jadi, ada selisih waktu 200 tahun.

Penulis naskah adalah semacam tim yang diketuai oleh Pangeran Wangsakerta. Soal identitas Pangeran Wangsakerta bisa disebutkan bahwa ia adalah tokoh historis yang juga tercatat dalam sumber primer kolonial di samping dalam sumber lokal. Pangeran Wangsakerta adalah salah seorang putra Panembahan Girilaya Penguasa Kerajaan Cirebon (1650-1662) (Hageman, 1867:243, Kielstra, 1917: 60). Dalam naskah disebutkan bahwa karya tersebut merupakan hasil *Gotrasawala (Seminar)* yang diselenggarakan di Cirebon dengan mengundang tim peneliti. Setiap daerah mengirim utusan berjumlah 70 orang. Tentulah ini merupakan seminar yang luar biasa besarnya waktu itu. Pengumpulan jumlah orang sebesar itu akan menarik perhatian VOC, yang saat itu tengah menghadapi berbagai konflik yang menyeretnya ke peperangan, seperti Perlawanan Trunojoyo, kasus konflik Banten-Sumedang, yang melibatkan kompeni, dll. Akan tetapi dalam Dagregister, peristiwa seminar di Cirebon ternyata tidak tercatat. Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan, benarkah seminar itu pernah diadakan? (lihat perdebatan tentang hal ini dalam majalah *Mangle*, 1265 dan 1266).

Selanjutnya mengenai tulisan yang dipergunakan, menurut keterangan Tien Wartini, (peneliti yang ikut dalam proyek kajian filologis naskah ini), bentuk huruf yang dipergunakan dalam naskah ini adalah huruf Jawa Kuna yang kurang bagus walau tidak bisa disebut buruk. Dalam satu jilid, peneliti ini menemukan beberapa huruf yang beda. Kertas yang dipergunakan juga ada dua, kuning dan coklat (lihat majalah *Mangle* No 1265). Selanjutnya menurut Buchori, arkeolog UI yang ahli tulisan kuno (paleografi), kertas yang dipergunakan untuk naskah ini adalah kertas manila yang dicelup. Lagi pula biasanya naskah sejarah ditulis dengan huruf-huruf yang bagus, sedangkan naskah ini ditulis dengan huruf yang jelek (lihat *Mangle* No 1266). M.C.Ricklefs menjelaskan bahwa ia pernah melihat naskah itu di Museum Sri Baduga

Kontroversi tentang Naskah Wangsakerta

dan ia menyatakan bahwa melihat tulisannya yang “kasar”, menunjukkan itu naskah baru, bukan naskah abad ke-17. Penulis sendiri, sebagai sejarawan, ketika melihat naskah itu bersama ESE, di Museum Sri Baduga, Oktober 2001, tidak tahu apakah tulisan itu tergolong kasar atau tidak.

Sementara itu, menurut ESE riwayat asal-usul naskah masih diliputi misteri yang belum terpecahkan. Penulis pernah menanyakan kepada Undang Darsa (filolog yang ikut dalam meneliti naskah ini) apakah Atja sebagai pembeli naskah, menyebutkan dari siapa naskah ini berasal. Ternyata Atja tetap merahasiakan dari siapa Moh. Asikin memperoleh naskah ini, bahkan Moh. Asikin pun kini telah meninggal dunia. Penulis pernah menanyakan hal ini kepada T.D. Sudjana, dalam kesempatan baru-baru ini. Penulis juga tidak mendapat jawaban yang diharapkan karena ternyata ahli sejarah Cirebon ini pun tidak tahu, hanya mengatakan bahwa kalau penulis mau mendapat salinan-salinan naskah lain, bisa membelinya di Cirebon.

Dengan melakukan kritik ekstern terhadap Naskah Wangsakerta di atas, penulis berkesimpulan bahwa naskah ini bukan sumber yang otentik, artinya tergolong sebagai sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak ditulis sezaman.

Selanjutnya dilihat dari segi kritik intern, kalau dilakukan koroborasi misalnya saja, untuk mencari kepastian tentang nama raja-raja Salakanagara (yaitu kerajaan yang menurut naskah ini terletak di sekitar Selat Sunda, pada abad pertama Masehi) ataupun Raja-raja Tarumanagara, yang dalam naskah begitu rinci dilengkapi dengan angka tahun pemerintahan, sumber lain mana yang bisa dipakai sebagai alat koroborasi. Hingga sekarang, prasasti yang ditemukan jumlahnya sangat terbatas, bahkan mengenai Kerajaan Salakanagara, belum ditemukan (atau tidak ada?). Maka dari itu, nilai informasi dari naskah Wangsakerta tentang hal tersebut sangat lemah.

Kerahasiaan asal-usul naskah ini mengundang pertanyaan: Mengapa? Ada apa?

Terlepas dari soal kecurigaan semacam itu, secara akademis, masalah asal-usul yang tidak jelas ini menurunkan tingkat kredibilitas naskah tersebut. Lagi pula, naskah ini belum tuntas diteliti secara filologis (baru 26 dari 48 buah naskah yang ada). ESE, sebagai peneliti naskah ini, mengakui bahwa ada keraguan dalam naskah ini mengingat hal-hal yang diperdebatkan di atas.

Berdasarkan uraian panjang-lebar di atas, penulis berkesimpulan bahwa Naskah Wangsakerta tidak dapat dipergunakan sebagai sumber sejarah. Meskipun demikian, naskah ini sah sebagai objek kajian filologi.

Penutup

Sebagai penutup, penulis ingin menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap sumber sejarah harus diuji terlebih dahulu secara kritis sebelum dipergunakan. Sumber primer sekalipun harus diuji kredibilitasnya. Naskah Wangsakerta yang tergolong sumber sekunder banyak mengandung kelemahan sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai sumber sejarah. Apabila nanti ditemukan salinan lain dari naskah ini sehingga dapat direkonstruksi arketipnya, atau bahkan ditemukan naskah aslinya, mungkin saja untuk ditinjau kembali. Sebenarnya, dalam khazanah penulisan sejarah Sunda masih ada naskah-naskah dari abad ke-16, yang lebih tua dari naskah Wangsakerta yaitu: *Bujangga Manik*, *Carita Parahyangan*, *Sanghyang Siksakandang Karesian*, *Sewaka Darma*. Naskah-naskah ini tergolong sumber primer dan memberikan informasi yang sangat berharga tentang sejarah Tatar Sunda. Penulis mengira bahwa masih ada naskah-naskah semacam ini yang mungkin masih tersimpan di kalangan masyarakat. Ini adalah garapan para filolog yang masih sangat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. (ed.).1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta: Gramedia.

Nina H. Lubis

- Atja. 1972. *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari*. Djakarta: Ikatan Karjawan Museum.
- Cortesaio, Armando. ed.1990. *The Suma Oriental of Tome Pires*. New Delhi: Asian Educational Services.
- Ekadjati, Edi S. 1988. Naskah Pangeran Wangsakerta, Mungkinkah Menjadi Sumber Sejarah Indonesia? Makalah (tidak diterbitkan).
- Ekadjati, Edi S. 2002. "Sekitar Naskah Pangeran Wangsakerta", *Pikiran Rakyat*, 19 Februari.
- Garraghan, Gilbert. J. 1946. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gottschalk, Louis. 1977. *Mengerti Sejarah*. (terj.). Jakarta: Universitas Indonesai Press.
- Hageman, J.Cz.J. '1867. "Geschiedenis der Soenda-landen", *TBG*, XVI.
- Kartodirdjo, Sartono. T.t. "Beberapa Persoalan Sekitar Sejarah Indonesia & Segi-segi Struktural Historiografi Indonesia". *Lembaran Sejarah*, UGM.
- Kielstra, E.B. 1917. "De Sultans van Cheribon", *De Indische Archipel*. Haarlem: De Erven F. Bohr.
- Kumpulan Makalah Panel Diskusi Naskah Sumber Sejarah Kerajaan Tarumanegara 16 September 1988*. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Kumpulan Makalah Gotrasawala Pengkajian Naskah-Naskah Kuno Jawa Barat. 23 Januari 1989*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Mangle*. 1988, No. 1265, 1266.